

ABSTRAK

Rizal Muhammad Faisal 2170010015 *Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bandung Berbasis ISO 9001:2008 Relevansinya Dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

Salah satu prinsip umum dalam penyelesaian perkara di Pengadilan yaitu prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan (SCBR). Prinsip/asas ini merupakan asas umum yang harus diterapkan oleh seluruh badan Peradilan di Indonesia yang salah satunya adalah Pengadilan Agama Bandung. Pengadilan Agama Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah mendapatkan penghargaan ISO 9001:2008 pada tahun 2015 dalam bidang Manajemen Mutu Lembaga Peradilan, serta pada Tahun 2017 berhasil mendapat Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dan mendapatkan predikat “A Excellent”. Namun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut terkesan tidak ada perubahan yang berarti (signifikan) dan diduga pelaksanaannya cenderung stagnan, padahal SOP berbasis ISO 9001:2008 tersebut diharapkan menjadi teknis utama dalam menerapkan asas SCBR di bidang pelayanan Peradilan sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 57 ayat (3) UU Peradilan Agama. Hal ini jelas terlihat di dalam teknis penerapannya, khususnya dalam administrasi dan pelayanan Peradilan. Salah satu teknis kelalaian yang ditemukan yaitu kinerja terkesan sebatas kejar target, semrawut, kurang transparan/ditutup-tutupi, pelayanan kurang ramah dan terkesan lambat, serta pengarsipan dokumen yang tidak sesuai standar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan SOP Pengadilan Agama Bandung berbasis ISO 9001:2008 dalam melayani para pihak, lalu untuk mendapatkan deskripsi tentang relevansi pelaksanaan SOP berbasis ISO 9001:2008 dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, lalu untuk menganalisis implikasi SOP Pengadilan Agama Bandung dalam penyelesaian perkara, serta untuk menganalisis unsur penunjang dan penghambat dalam penerapan SOP tersebut.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu teori negara hukum sebagai *grant theory*, teori hukum acara Peradilan Agama sebagai *middle theory*, dan teori penegakan hukum sebagai *aplicated theory*. Dalam teori negara hukum dipaparkan mengenai prinsip, unsur, ciri, dan pendapat para ahli hukum mengenai konsep negara hukum. Dalam teori hukum acara Peradilan Agama dipaparkan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya teori mengenai asas SCBR. Dalam teori penegakan hukum di paparkan pendapat para ahli dalam hal teknis penerapan, penegakan dan efektivitas suatu asas hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan memperhatikan proses penerapan, relevansi, unsur penunjang dan penghambat, serta implikasi dari penerapan SOP ini. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang diteliti meliputi data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan SOP ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena beberapa teknis pelayanan masih belum dijalankan sesuai SOP, dalam hal ini masih ditemukan pegawai/staf yang tidak bekerja sebagaimana SOP pelayanan yang ditetapkan. Adapun relevansi antara pelaksanaan SOP dengan pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu SOP berperan sebagai tolak ukur atau teknis yang bertujuan untuk terselenggaranya Peradilan yang lebih SCBR. Implikasi dari SOP masih belum terlihat adanya perubahan yang cukup berarti dalam bidang pelayanan Pengadilan. Adapun unsur penunjangnya yaitu adanya teknis *evidence*, tersedianya POSBAKUM, dan mekanisme *one gate integrated services*. Sedangkan penghambatnya yaitu faktor hukum, masyarakat, SDM, sarana prasarana, dan adanya sebagian staf yang tidak mengikuti SOP.

Kata Kunci: Implementasi, Hukum, Asas, SOP, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Rizal Muhammad Faisal 2170010015 *Implementation of Operational Standards Procedure for Bandung Religious Courts Based on ISO 9001: 2008 Relevance with Article 2 Paragraph 4 of Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Concerning Judicial Power*

One of the general principles in the settlement of cases in the Court is the simple principle, fast, and low cost (SCBR). This principle / principle is a general principle that must be applied by all judicial bodies in Indonesia, one of which is the Bandung Religious Court. Bandung Religious Court is one of the Religious Courts in Indonesia that has Standard Operating Procedures (SOP) and has been awarded the ISO 9001: 2008 award in 2015 in the field of Quality Management of Judicial Institutions, and in 2017 successfully obtained the Quality Assurance Accreditation Standardization (SAPM) and get the title "A Excellent". However, based on observations that have been made, it was found that in the implementation of ISO 9001: 2008-based SOPs there was no significant change and it was suspected that the implementation tended to be stagnant, even though the ISO 9001: 2008-based SOP was expected to be the main technical in implementing the SCBR principle as set forth in article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Act jo. article 57 paragraph (3) of the Religious Courts Law. This is clearly seen in the technical application, particularly in administration and service of the Judiciary. One of the technical negligence found was performance that seemed limited to chasing targets, chaotic, less transparent/covered up, service was not friendly and seemed slow, and archiving documents that were not up to standard.

This study aims to analyze the process of implementing the SOP of the Bandung Religious Court based on ISO 9001: 2008 in serving the parties, then to get a description of the relevance of the implementation of the ISO 9001: 2008-based SOP with article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Law, then to analyze the SOP implications Bandung Religious Court in the settlement of the case, as well as to analyze the supporting and inhibiting elements in the application of the SOP.

The framework of this study uses 3 theories, namely the theory of the rule of law as a grant theory, the legal theory of the Religious Courts event as a middle theory, and the law enforcement theory as an applied theory. In the theory of the rule of law the principles, elements, characteristics, and opinions of legal experts regarding the concept of the rule of law are presented. In the legal theory of the Religious Courts program, it is explained about matters relating to this research, especially the theory regarding the principle of SCBR. In the theory of law enforcement the experts' opinions are expressed in terms of the technical application, enforcement and effectiveness of a legal principle.

The research method used is Descriptive Analysis with regard to the process of application, relevance, supporting and inhibiting elements, and the implications of the application of this SOP. The approach taken is an empirical juridical approach. The data studied included primary data and secondary data, then analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that the process of implementing this SOP was still not running as it should because some technical services were still not carried out according to the SOP, in this case there were still found employees / staff who did not work as the service SOPs were set. The relevance of the implementation of the SOP with article 2 paragraph (4) of the Judicial Power Law, namely the SOP, serves as a benchmark or technical aiming at the implementation of a more SCBR Justice. The implications of the SOP have not yet seen significant changes in the field of court services. The supporting elements are technical evidence, POSBAKUM availability, and one gate integrated services mechanism. While the obstacles are legal, community, human resources, infrastructure, and the existence of some staff who do not follow the SOP.

Keywords: Implementation, Law, Principle, SOP, Religious Courts